

## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. Deskripsi Teoritis**

#### **1. Kinerja Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD)**

##### **a. Pengertian Kinerja**

“Kinerja adalah fungsi dari motivasi, kecakapan, dan persepsi peranan”. Stoner dalam Ismail Nawawi Uha (2013:213). “Kinerja merupakan sebuah proses dimana organisasi mengevaluasi atau menilai prestasi kerja karyawan”. Handoko dalam Ismail Nawawi Uha (2013:213). “Kinerja adalah apa yang dapat dikerjakan oleh seseorang sesuai dengan tugas dan fungsinya”. Gilbert dalam Notoatmodjo (2009:124).

Dapat disimpulkan bahwa kinerja merupakan sebuah proses pencapaian dari suatu pekerjaan yang dalam pelaksanaannya dapat dilihat dari motivasi, peranan ataupun dari semangat kerjanya yang kemudian dapat dievaluasi ataupun dinilai untuk menentukan prestasi kerja seseorang.

Murphy dan Cleveland dalam Ismail Nawawi Uha (2013:212) mengatakan bahwa “Kinerja adalah kualitas perilaku yang berorientasi pada tugas dan pekerjaan”. Lebih jelas dikemukakan oleh Prawirosentono dalam Ismail Nawawi Uha (2013:211) bahwa kinerja (*performance*) dari akar kata *to perform* yang mempunyai beberapa entries sebagai berikut:

1. Melakukan, menjalankan, dan melaksanakan.
2. Memenuhi, menjalankan kewajiban suatu nazar.
3. Menjalankan suatu karakter dalam suatu permainan.
4. Menggambarkan dengan suara atau alat musik.
5. Melaksanakan atau menyempurnakan suatu tanggung jawab.
6. Melakukan suatu kegiatan dalam suatu permainan.
7. Memainkan pertunjukan musik.
8. Melakukan sesuatu yang diharapkan oleh seseorang atau mesin.

Gibson dalam Notoatmodjo (2009:124) mengemukakan bahwa faktor-faktor yang menentukan kinerja seseorang dikelompokkan menjadi 3 variabel utama yakni:

1. Variabel individu, yang terdiri dari pemahaman terhadap pekerjaannya, pengalaman kerja, latar belakang keluarga, tingkat sosial ekonomi, dan faktor demografi (umur, jenis kelamin, etnis).
2. Variabel organisasi, yang antara lain terdiri dari kepemimpinan, desain pekerjaan, struktur organisasi, dan sumber daya yang lain.
3. Variabel psikologis, yang terdiri dari persepsi terhadap pekerjaan, sikap terhadap pekerjaan, motivasi, kepribadian, dan lain sebagainya.

Dapat disimpulkan bahwa kinerja merupakan hasil kerja yang dilakukan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab seseorang dalam menyelesaikan pekerjaannya, yang dikerjakan secara maksimal sesuai

dengan kode etik yang berlaku dalam suatu perusahaan, organisasi, ataupun yang lain sebagainya yang dapat dilihat dari faktor individu, organisasi, dan psikologi.

### **b. Pengertian Kader**

Kader merupakan orang yang mampu menjalankan amanat, orang yang memiliki kapasitas pengetahuan dan keahlian serta kemampuan untuk memenejemen kelangsungan suatu organisasi. Menurut Nano Wijaya “kader adalah orang atau kumpulan orang yang dibina oleh suatu lembaga kepengurusan dalam sebuah organisasi, baik sipil maupun militer, yang berfungsi sebagai “pemihak” dan atau membantu tugas dan fungsi pokok organisasi tersebut”. (<http://id.wikipedia.org/wiki/Kader>).

Kader merupakan seseorang yang diberi kepercayaan yang dipercaya memiliki kapasitas pengetahuan dan keahlian yang dapat menjalankan amanat, yang berfungsi sebagai pemihak dengan mendengarkan secara langsung segala bentuk aspirasi dari suatu anggota organisasi, membantu dalam proses perencanaan, dalam suatu kegiatan.

### **c. Pengertian Pemberdayaan**

Istilah pemberdayaan memang sudah tidak asing lagi ditelinga kita, kata pemberdayaan sendiri sering kita ketahui sebagai upaya dari pemerintah untuk menangani masalah kemiskinan dan keterbatasan

dalam masyarakat sebagai bentuk penanggulangan dari masalah tersebut, seperti pemberdayaan masyarakat desa, pemberdayaan perempuan dan lain sebagainya. Melalui pemberdayaan ini, masyarakat atau pun pihak tertentu (yang lemah) diharapkan mampu berkembang menjadi pribadi yang lebih mandiri, memiliki pengetahuan serta pengalaman, terampil dan mampu berkarya.

Menurut Djohani dalam Oos M. Anwas (2013:49) “pemberdayaan adalah suatu proses untuk memberikan daya/kekuasaan kepada pihak yang lemah dan mengurangi kekuasaan kepada pihak yang terlalu berkuasa sehingga terjadi keseimbangan”. Begitu pula dengan Rappaport dalam Oos M. Anwas (2013:49) yang menjelaskan bahwa “pemberdayaan adalah suatu cara dengan mana rakyat, organisasi, dan komunitas diarahkan agar mampu menguasai atau berkuasa atas kehidupan”.

Pengertian di atas lebih menekankan pemberdayaan pada pemberian kekuasaan atau wewenang kepada pihak yang tidak berdaya sehingga ia mampu mengatur dirinya sendiri dan menguasai segala potensi yang ada dalam dirinya maupun lingkungannya. Pemberdayaan merupakan suatu upaya yang menjadikan yang tidak berdaya menjadi berdaya, dimana didalamnya terkandung sebuah edukasi yang akan menjadikan kaum yang tidak berdaya memiliki pengetahuan yang luas, terampil, cerdas dalam mengambil peluang, dan berdaya saing.

Parsons dalam Oos M. Anwas (2013:49) menyatakan bahwa “pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya”. Selanjutnya Ife dalam Oos M. Anwas (2013:49) “pemberdayaan adalah menyiapkan kepada masyarakat berupa sumber daya, kesempatan, pengetahuan dan keahlian untuk meningkatkan kapasitas diri masyarakat di dalam menentukan masa depan mereka, serta berpartisipasi dan mempengaruhi kehidupan dalam komunitas masyarakat itu sendiri”. Selanjutnya Ife dalam Edi Suharto (2015:59) juga mengemukakan bahwa pemberdayaan memuat dua pengertian kunci, yakni kekuasaan dan kelompok lemah. Kekuasaan di sini diartikan bukan hanya menyangkut kekuasaan politik dalam arti sempit, melainkan kekuasaan atau penguasaan klien atas:

1. Pilihan-pilihan personal dan kesempatan-kesempatan hidup, yaitu kemampuan dalam membuat keputusan-keputusan mengenai gaya hidup, tempat tinggal, dan pekerjaan.
2. Pendefinisian kebutuhan, yaitu kemampuan menentukan kebutuhan selaras dengan aspirasi dan keinginannya.
3. Ide atau gagasan, yaitu kemampuan mengekspresikan dan menyumbangkan gagasan dalam suatu forum atau diskusi secara bebas dan tanpa tekanan.
4. Lembaga-lembaga, yaitu kemampuan menjangkau, menggunakan, dan mempengaruhi pranata-pranata masyarakat, seperti lembaga kesejahteraan sosial, pendidikan, dan kesehatan.
5. Sumber-sumber, yaitu kemampuan memobilisasi sumber-sumber formal, informal, dan kemasyarakatan.
6. Aktivitas ekonomi, yaitu kemampuan memanfaatkan dan mengelola mekanisme produksi, distribusi dan pertukaran barang serta jasa.
7. Reproduksi, yaitu kemampuan dalam kaitannya dengan proses kelahiran, perawatan anak, pendidikan dan sosialisasi.

Berdasarkan definisi di atas menunjukkan bahwa pemberdayaan bukan hanya mengajarkan atau sekedar memberikan informasi semata, melainkan pemberdayaan merupakan upaya yang dilakukan dengan ketulusan hati untuk dapat mengarahkan, membina, mendidik, dan membimbing masyarakat yang tidak berdaya sehingga menjadi berdaya, menjadi masyarakat yang lebih mandiri dan mengerti dalam menata kehidupannya menuju kearah yang lebih baik.

Pemberdayaan merupakan solusi yang tepat untuk mengatasi kemiskinan apabila pelaksanaannya diterapkan dengan benar. Dengan adanya pemberdayaan, masyarakat akan lebih memiliki pengetahuan yang luas untuk dapat menata kehidupannya kearah yang lebih maju. Melalui pemberdayaan, segala potensi yang ada dilingkungan masyarakat akan lebih mudah digali untuk dapat dimanfaatkan pemanfaatannya baik itu potensi sumber daya manusianya maupun potensi sumberdaya alamnya, dengan demikian pemberdayaan mempunyai peranan penting dalam upaya pembangunan.

### **c.1. Prinsip Pemberdayaan**

Pemberdayaan lebih menekankan pada bertumbuhnya rasa percaya diri seseorang sehingga ia mampu menggali dan mengelola segala potensi-potensi yang ada yang mampu menunjang bagi kesejahteraan kehidupannya maupun

lingkungannya. Berikut ini prinsip-prinsip pelaksanaan pemberdayaan menurut Oos M. Anwas, (2013:58) :

- a. Pemberdayaan dilakukan dengan cara yang demokratis dan menghindari unsur paksaan. Setiap individu memiliki hak yang sama untuk berdaya. Setiap individu juga memiliki kebutuhan, masalah, bakat, minat, dan potensi yang berbeda. Unsur-unsur pemaksaan melalui berbagai cara perlu dihindari karena bukan menunjukkan ciri dari pemberdayaan.
- b. Kegiatan pemberdayaan didasarkan pada kebutuhan, masalah, dan potensi klien/sasaran. Hakekatnya, setiap manusia memiliki kebutuhan dan potensi dalam dirinya. Proses pemberdayaan dimulai dengan menumbuhkan kesadaran kepada sasaran akan potensi dan kebutuhannya yang dapat di kembangkan dan diberdayakan untuk mandiri. Proses pemberdayaan juga dituntut untuk berorientasi kepada kebutuhan dan potensi yang dimiliki sasaran.
- c. Sasaran pemberdayaan adalah sebagai objek atau pelaku dalam kegiatan pemberdayaan. Oleh karena itu sasaran menjadi dasar pertimbangan dalam menentukan tujuan, pendekatan, dan bentuk aktivitas pemberdayaan.
- d. Pemberdayaan berarti menumbuhkan kembali nilai, budaya, dan kearifan-kearifan lokal yang memiliki nilai luhur dalam masyarakat.
- e. Pemberdayaan merupakan sebuah proses yang memerlukan waktu, sehingga dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan.
- f. Kegiatan pendampingan atau pembinaan perlu dilakukan secara bijaksana, bertahap, dan berkesinambungan.
- g. Pemberdayaan tidak bisa dilakukan dari salah satu aspek saja, tetapi perlu dilakukan secara holistik terhadap semua aspek kehidupan yang ada dalam masyarakat.
- h. Pemberdayaan perlu dilakukan terhadap kaum perempuan terutama remaja dan ibu-ibu muda sebagai potensi besar dalam mendongkrak kualitas kehidupan keluarga dan pengntasan kemiskinan.
- i. Pemberdayaan dilakukan agar masyarakat memiliki kebiasaan untuk terus belajar, belajar sepanjang hayat.
- j. Pemberdayaan perlu memperhatikan adanya keragaman budaya.
- k. Pemberdayaan diarahkan untuk menggerakkan partisipasi aktif individu dan masyarakat seluas-luasnya.
- l. Klien/sasaran pemberdayaan perlu ditumbuhkan jiwa kewirausahaan sebagai bekal menuju kemandirian.

- m. Agen pemberdayaan atau petugas yang melaksanakan pemberdayaan perlu memiliki kemampuan (kompetensi) yang cukup, dinamis, fleksibel dalam bertindak, serta dapat mengikuti perkembangan zaman dan tuntutan masyarakat.
- n. Pemberdayaan perlu melibatkan berbagai pihak yang ada dan terkait dalam masyarakat, mulai dari unsur pemerintah, tokoh, guru, kader, ulama, pengusaha, LSM, relawan, dan anggota masyarakat lainnya. Semua pihak tersebut dilibatkan sesuai peran, potensi, dan kemampuannya.

Pemberdayaan, dalam pelaksanaannya lebih mengarah kepada pemberian wewenang atau kepercayaan kepada masyarakat, dengan terus memupuk rasa percaya diri dalam setiap individunya agar mereka yakin bahwa mereka dapat merubah kehidupannya kearah yang lebih baik dan menjadi lebih sejahtera, dengan terus memberikan pengarahan dan pengawasan dalam setiap pelaksanaannya. Selain itu, pemberian wewenang atau kepercayaan kepada masyarakat dapat memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berfikir kreatif dalam mengolah potensi yang ada, dengan pemberian wewenang ini juga masyarakat akan lebih bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya.

Kegiatan pemberdayaan, dalam pelaksanaannya diperlukan partisipasi dari masyarakat, karena pemberdayaan tidak akan dapat berjalan sendiri tanpa adanya dukungan dari masyarakat. Masyarakat yang merupakan objek sekaligus pelaku dalam pemberdayaan diharapkan mampu untuk dapat berpartisipasi



dalam setiap bentuk kegiatannya baik itu dalam proses perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi.

### **c.2. Strategi Pemberdayaan**

Agar suatu pencapaian dapat maksimal maka diperlukan strategi yang tepat. Begitu pula dengan pemberdayaan, perlu adanya strategi yang dapat mendukung tercapainya tujuan dari program pemberdayaan secara maksimal. Keberhasilan pemberdayaan tidak hanya menekankan pada hasil melainkan pada proses, dimana masyarakat dapat berpartisipasi secara menyeluruh yang berbasis pada kebutuhan dan potensi masyarakat, sehingga masyarakat dapat memperoleh pengalaman kerja yang dapat ia terapkan dikemudian hari. Dengan masyarakat berpartisipasi secara aktif berarti pemberdayaan telah berhasil menumbuhkan potensi yang ada dalam diri masyarakat, yang kemudian dapat berdampak baik pada lingkungannya.

Kegiatan pelaksanaan pemberdayaan perlu dilakukan melalui berbagai pendekatan. Suharto dalam Oos M. Anwas (2013:87), mengemukakan bahwa “penerapan pendekatan pemberdayaan dapat dilakukan melalui 5P yaitu pemungkinan, penguatan, perlindungan, penyokongan, dan pemeliharaan”. Berikut ini penjelasannya:

1. Pemungkinan yaitu, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal. Pemberdayaan harus mampu membebaskan masyarakat dari sekat-sekat kultural dan struktur yang menghambat.
2. Penguatan yaitu, memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Pemberdayaan harus mampu menumbuh kembangkan segenap kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat yang menunjang kemandirian mereka.
3. Perlindungan yaitu, melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat, menghindari persaingan yang tidak seimbang (apalagi tidak sehat) antara yang kuat dan lemah, dan mencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat terhadap kelompok lemah. Pemberdayaan harus diarahkan pada penghapusan segala jenis diskriminasi dan dominasi yang tidak menguntungkan rakyat kecil.
4. Penyokongan yaitu, memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu menjalankan perannya dan tugas-tugas kehidupannya. Pemberdayaan harus mampu menyokong masyarakat agar tidak terjatuh ke dalam keadaan dan posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan.
5. Pemeliharaan yaitu, pemeliharaan kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Pemberdayaan harus mampu menjamin keselarasan dan keseimbangan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan berusaha.

Permasalahan masyarakat yang begitu kompleks juga keadaan masyarakat yang begitu beragam dengan pola pikir yang berbeda-beda, menjadikan pengelola pemberdayaan harus mampu menyusun strategi yang tepat untuk diterapkan dalam kondisi yang demikian. Keadaan masyarakat yang penuh dengan keberagaman tentunya dapat menjadi kendala dalam pelaksanaan pemberdayaan, namun yang terpenting adalah bagaimana menjadikan keberagaman tersebut menjadi satu kesatuan yang

dapat dipadukan untuk mendukung program-program pemberdayaan.

Dubois dan Miley dalam Oos M. Anwas (2013:88) menjelaskan empat cara dalam melakukan pemberdayaan masyarakat, yaitu:

1. Membangun relasi pertolongan yang diwujudkan dalam bentuk merefleksikan respon rasa empati terhadap sasaran, menghargai pilihan dan hak klien/sasaran untuk menentukan nasibnya sendiri (*self determination*), menghargai perbedaan dan keunikan individu, serta menekankan kerjasama klien (*client partnerships*).
2. Membangun komunikasi yang diwujudkan dalam bentuk menghormati dan harga diri klien/sasaran, mempertimbangkan keragaman individu, berfokus pada klien/sasaran, serta menjaga kerahasiaan yang dimiliki oleh klien/sasaran.
3. Terlibat dalam pemecahan masalah yang dapat diwujudkan dalam bentuk memperkuat partisipasi klien dalam semua aspek proses pemecahan masalah, menghargai hak-hak klien, merangkai tantangan-tantangan sebagai kesempatan belajar, serta melibatkan klient atau sasaran dalam membuat keputusan dan kegiatan evaluasinya.
4. Merefleksikan sikap dan nilai profesi pekerjaan sosial yang diwujudkan dalam bentuk ketaatan terhadap kode etik profesi, keterlibatan dalam pengembangan profesional, melakukan riset, dan perumusan kebijakan, penerjemahan kesulitan-kesulitan pribadi ke dalam isu-isu publik, serta penghapusan segala bentuk diskriminasi dan tidak kesetaraan kesempatan.

Semua cara atau teknik di atas menunjukkan perlu adanya strategi yang tepat untuk melaksanak pemberdayaan di dalam masyarakat yang mempunyai latar belakang yang berbeda-beda. Kegiatan pemberdayaan pada dasarnya merupakan kegiatan dari, oleh dan untuk masyarakat, maka dari itu untuk menentukan keberhasilan dari pemberdayaan itu sendiri berada pada masyarakatnya sendiri.

Masyarakat yang sangat heterogen tentunya memiliki pandangan yang berbeda antara satu dengan yang lain, dalam menentukan keberhasilan pemberdayaan, maka dari itu perlu adanya strategi yang tepat yang dapat menyatukan perbedaan tersebut, seperti pembentukan kader-kader pemberdayaan yang dapat menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya dalam setiap bentuk kegiatan pemberdayaan.

#### **d. Pengertian Masyarakat**

Kata masyarakat dalam bahasa Inggris, diterjemahkan menjadi dua pengertian, yaitu *society* dan *community*. *Community* menurut Arthur Hilman dalam Abdul Syani (2007:30) "*a definition community must be inclusive enough to take account of the variety of both physical and social forms which community take*". Dengan kata lain, masyarakat sebagai *community* cukup memperhitungkan dua variasi dari suatu yang berhubungan dengan kehidupan bersama antara manusia dan lingkungan alam. Kemudian menurut Hassan Shadily dalam Abdul Syani (2007:30) "*community disebut sebagai paguyuban yang memperlihatkan rasa sentimen yang sama seperti terdapat dalam Gemeninschaf dimana anggotanya mencari kepuasan berdasarkan adat kebiasaan dan sentimen (faktor primer), kemudian diikuti atau diperkuat oleh lokalitas (faktor sekunder)*".

Abdul Syani (2007:30) menjelaskan bahwa masyarakat sebagai community dapat dilihat dari dua sudut pandang:

1. Memandang community sebagai unsur statis, artinya community terbentuk dalam suatu wadah atau tempat dengan batas-batas tertentu, maka ia menunjukkan bagian dari kesatuan-kesatuan masyarakat sehingga ia dapat pula disebut sebagai masyarakat setempat, misalnya kampung, dusun atau kota-kota kecil. Masyarakat setempat adalah suatu wadah dan wilayah dari kehidupan sekelompok orang yang ditandai oleh adanya hubungan sosial. Disamping itu dilengkapi pula oleh adanya perasaan sosial, nilai-nilai dan norma-norma yang timbul atas akibat dari adanya pergaulan hidup atau hidup bersama manusia.
2. Community dipandang sebagai unsur yang dinamis, artinya menyangkut suatu proses yang terbentuk melalui faktor psikologis dan hubungan antar manusia, maka didalamnya terkandung unsur-unsur kepentingan, keinginan atau tujuan-tujuan yang sifatnya fungsional.

Abdul Syani (2007:30) juga menjelaskan bahwa “perkataan masyarakat berasal dari kata musyarak (arab), yang artinya bersama-sama, kemudian berubah menjadi masyarakat, yang artinya berkumpul bersama, hidup bersama dengan saling berhubungan dan saling mempengaruhi, selanjutnya mendapat kesepakatan menjadi masyarakat (indonesia)”.

Menurut Auguste Comte dalam Abdul Syani (2007:31) “masyarakat merupakan kelompok-kelompok makhluk hidup dengan realitas-realitas baru yang berkembang menurut hukum-hukumnya sendiri dan berkembang menurut pola perkembangan yang tersendiri”. Menurut Hassan Shadily dalam Abdul Syani (2007:31) “masyarakat dapat didefinisikan sebagai golongan besar atau kecil dari beberapa manusia

yang dengan atau sendirinya bertalian secara golongan dan mempunyai pengaruh kebatinan satu sama lain.

Ralp Linton dalam Abdul Syani (2007:31) mengemukakan bahwa “masyarakat adalah setiap kelompok manusia yang telah cukup lama hidup dan bekerjasama, sehingga mereka itu dapat mengorganisasikan dirinya dan berpikir tentang dirinya dalam satu kesatuan sosial dengan batas-batas tertentu”. Sedangkan menurut J.L. Gillin dan J.P. Gillin dalam Abdul Syani (2007:32) “masyarakat adalah kelompok manusia yang tersebar dan mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap, dan perasaan persatuan yang sama”.

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa masyarakat merupakan sekumpulan manusia yang hidup bersama dalam suatu kelompok tertentu dengan tujuan yang sama, dimana didalamnya terdapat suatu peraturan-peraturan yang dibentuk untuk mencapai tujuan-tujuan yang dikehendaki. Masyarakat merupakan kumpulan dari individu-individu di mana setiap individu tersebut saling membutuhkan dan saling mempengaruhi antara satu dengan yang lainnya. Sebagaimana pada hakekatnya manusia adalah makhluk sosial, dimana manusia tidak akan dapat hidup sendiri tanpa bantuan dari orang lain, maka atas dasar tersebutlah manusia membentuk suatu komunitas-komunitas ataupun kelompok-kelompok kehidupan sehingga mereka dapat melengkapi antara satu dengan yang lainnya, bekerjasama, tolong menolong dan saling berinteraksi.

### **d.1. Ciri-Ciri dan Unsur-Unsur Masyarakat**

Menurut Soerjono Soekanto dalam Abdul Syani (2007:32) menyatakan bahwa sebagai suatu pergaulan hidup atau suatu bentuk kehidupan bersama manusia, maka masyarakat itu mempunyai ciri-ciri pokok yaitu:

- a. Manusia yang hidup bersama. Di dalam ilmu sosial tidak ada ukuran yang mutlak maupun angka yang pasti untuk menentukan berapa jumlah manusia yang harus ada. Akan tetapi secara teoritis, angka minimumnya ada dua orang yang hidup bersama.
- b. Bercampur untuk waktu yang cukup lama. Kumpulan dari manusia tidaklah sama dengan kumpulan benda-benda mati seperti umpamanya kursi, meja dan sebagainya. Oleh karena dengan berkumpulnya manusia, maka akan timbul manusia-manusia baru. Manusia itu juga dapat bercakap-cakap, merasa dan mengerti, mereka juga mempunyai keinginan-keinginan untuk menyampaikan kesan-kesan atau perasaan-perasaannya. Sebagai akibat hidup bersama itu, timbullah sistem komunikasi dan timbul peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antar manusia dalam kelompok tersebut.
- c. Mereka sadar bahwa mereka merupakan suatu kesatuan.
- d. Mereka merupakan suatu sistem hidup bersama. Sistem kehidupan bersama menimbulkan kebudayaan, oleh karena setiap anggota kelompok merasa dirinya terikat satu dengan yang lainnya.

Pada konsep ini, masyarakat lebih dicirikan pada gambaran secara teoritis dimana suatu kelompok individu dapat disebut dengan masyarakat apabila didalamnya terjadi suatu interaksi antar dua orang atau lebih, yang sepakat untuk hidup bersama dalam kurun waktu yang cukup lama, yang dengan sadar mereka menyadari bahwa mereka merupakan satu kesatuan dan merupakan sistem

hidup bersama, sehingga timbul ikatan perasaan antara satu dengan yang lainnya.

Menurut Krech dalam Elly M. Setiadi (2012:80) mengemukakan bahwa ciri atau unsur masyarakat terdiri dari:

1. Kumpulan orang
2. Sudah terbentuk dengan lama
3. Sudah memiliki sistem sosial atau struktur sosial tersendiri
4. Memiliki kepercayaan, sikap dan perilaku yang dimiliki bersama.

Menurut Horton dan Hunt dalam Elly M. Setiadi (2012:82) masyarakat memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Kelompok Manusia
2. Sedikit banyak memiliki kebebasan dan bersifat kekal
3. Menempati suatu kawasan
4. Memiliki kebudayaan
5. Memiliki hubungan dengan kelompok yang bersangkutan.

Berdasarkan konsep di atas, menunjukkan bahwa masyarakat dicirikan dengan sekumpulan orang atau manusia yang sudah terbentuk dengan waktu yang cukup lama, dengan menempati suatu wilayah tertentu, dan telah memiliki sistem sosial dan struktur sosial. Dengan demikian terbentuklah suatu kebudayaan



dan kepercayaan yang dapat membentuk sikap dan perilaku sebagai suatu nilai yang dapat terus diamalkan dalam kehidupan.

#### **e. Pengertian Desa**

Menurut UU. No. 6 Tahun 2015 desa adalah:

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa merupakan suatu wilayah tempat tinggal dimana didalamnya masih terdapat keasrian, terdapat masyarakat yang masih memegang teguh nilai luhur dan kebudayaan. Masyarakat perdesaan pada umumnya dapat memenuhi kebutuhan melalui kegiatan bertani, dan berternak. Desa merupakan suatu tempat dimana di dalamnya terdapat masyarakat yang mempunyai hubungan yang erat antara satu dengan yang lainnya, serta memiliki rasa simpati dan empati yang tinggi terhadap sesamanya.

Pengertian desa menurut UU No. 5 Tahun 1979 adalah:

Suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat dan hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut UU No. 22 Tahun 1999 “desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten”.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 ”desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Dapat disimpulkan bahwa desa merupakan unit organisasi pemerintahan terendah dari suatu daerah atau kecamatan yang berhak mengatur urusan rumah tangganya sendiri, memiliki masyarakat yang memegang teguh terhadap nilai luhur budaya, dan memiliki rasa persatuan dan kesatuan yang tinggi berdasarkan adat dan hukum adat. Memiliki ikatan yang sangat kuat baik secara lahir dan batin maupun karena persamaan kepentingan antar masyarakat, dan selalu mengutamakan musyawarah dalam setiap pengambilan keputusan dalam pemerintahannya.

#### **f. Pengertian Kinerja Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa**

Kinerja kader pemberdayaan masyarakat desa (KPMD) merupakan sebuah proses kerja dari tim kader pemberdayaan masyarakat desa, sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Sedangkan pengertian dari KPMD sendiri adalah sebuah tim yang dibentuk oleh masyarakat melalui musyawarah desa dengan menunjuk satu orang laki-laki dan satu orang perempuan sebagai anggotanya. KPMD bertugas sebagai pendamping masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pemeliharaan/pelestarian dalam sebuah kegiatan pembangunan.

KPMD adalah warga desa terpilih yang memfasilitasi atau memandu masyarakat dalam mengikuti atau melaksanakan tahapan PNPM Mandiri Perdesaan di desa dan kelompok masyarakat pada tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun pemeliharaan/pelestarian. Sebagai kader masyarakat, peran dan tugasnya dalam membantu pengelolaan pembangunan, diharapkan dapat menarik simpati dari masyarakat, bekerja sama dengan baik, serta memberikan pelayanan dengan baik agar masyarakat dapat berpartisipasi secara aktif sehingga pembangunan yang akan dilaksanakan dapat mengenai sasaran dengan tepat dan optimal.

KPMD sebagai agen pemberdayaan dituntut agar memiliki jiwa sosial yang tinggi. Sebagai kader pemberdayaan masyarakat harus dapat melayani masyarakat kapanpun dan dimanapun dengan sepenuh hati, mampu mengarahkan serta membimbing masyarakat dalam proses

pembangunan, memiliki sikap jujur serta kesukarelaan yang tinggi dalam menjalankan tugasnya. Sebagai kader pemberdayaan masyarakat yang berhubungan langsung dengan masyarakat, KPMD harus mampu mendorong serta menciptakan masyarakat yang mampu melakukan perubahan dalam dirinya sendiri sehingga menjadi pribadi yang lebih mandiri dan berdaya saing. Perubahan ini menyangkut pada aspek pengetahuan, sikap, maupun keterampilan yang berguna untuk meningkatkan kualitas kehidupan. Sebagaimana terkandung dalam UU No. 6 Tahun 2015 Tentang Desa yang menjelaskan bahwa:

Pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

Pemberdayaan sebenarnya tidak hanya dapat dilakukan dalam pengentasan kemiskinan saja, namun pemberdayaan seringkali diterapkan untuk menangani masalah kemiskinan. Kegiatan pemberdayaan dinilai sebagai solusi yang tepat dalam penuntasan kemiskinan, karena melalui pemberdayaan, masyarakat tidak hanya mendapatkan peningkatan pendapatannya semata, akan tetapi melalui program pemberdayaan ini masyarakat dapat memperoleh pendidikan, pengalaman, pembinaan serta aspek lain yang dapat meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.

Program PNPM Mandiri Perdesaan dalam kegiatannya KPMD mempunyai tugas dan tanggung jawab yang harus dipikulnya, yaitu sebagai berikut:

1. Memfasilitasi pelaksanaan pendataan RTM dan penyusunan peta sosial pada saat musyawarah dusun.
2. Mengumpulkan data-data yang diperlukan untuk proses penggalian gagasan, seperti data kelompok masyarakat yang ada di desa, data penduduk miskin, hasil pendataan RTM dan data pendukung lainnya.
3. Menyebarkan dan mensosialisasikan PNPM Mandiri Perdesaan kepada masyarakat desa.
4. Memastikan terlaksananya tahap-tahap kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan di desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pelestarian.
5. Mendorong dan memastikan penerapan prinsip-prinsip dan kebijakan PNPM Mandiri Perdesaan setiap tahapan PNPM Mandiri Perdesaan di desa, mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pelestarian.
6. Mengikuti pertemuan bulanan dengan PL yang difasilitasi oleh Fasilitator Kecamatan untuk membahas kendala dan permasalahan yang muncul serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan.
7. Membantu dan memfasilitasi proses penyelesaian masalah perselisihan di desa.
8. Mengefektifkan penggunaan papan informasi di desa dan dusun.
9. Mendorong masyarakat untuk berperan serta dalam pelaksanaan kegiatan, termasuk dalam pengawasan.
10. Mensosialisasikan sanksi dan keputusan lainnya yang telah ditetapkan dalam Musyawarah Antar Desa dan Musyawarah Desa kepada masyarakat.  
(<http://upk-pnpmsurade.org/pto-pnpm/penjelasan-pto-pnpm/39-penjelasan-05-pelaku-pnpm-mp/115-kpmd-kader-pemberdayaan-masyarakat-desa.html>).

Sebagai kader pemberdayaan yang ditunjuk langsung oleh masyarakat dalam sebuah musyawarah desa, KPMD yang mempunyai andil dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan harus mampu dan bersedia melaksanakan tugasnya serta mengabdikan sepenuhnya kepada

masyarakat demi kemajuan masyarakat dan desanya. Sebagai kader pemberdayaan yang mempunyai tugas baik itu dalam proses perencanaan, pelaksanaan maupun pemeliharaan/pelestarian, terdapat beberapa tahapan-tahapan di dalam melaksanakan tugasnya tersebut, diantaranya:

1. Tahap perencanaan yang meliputi:

- a) Menggali gagasan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya.
- b) Mencatat dan menginventarisir gagasan masyarakat pada waktu penggalan gagasan sebagai bahan untuk pembahasan di musyawarah desa/perencanaan usulan desa.
- c) Membantu Tim Pengelola Kegiatan dan Kepala Desa mulai dari persiapan sampai selesainya penyelenggaraan pertemuan musyawarah di desa.
- d) Memfasilitasi pertemuan-pertemuan musyawarah desa
- e) Menyusun usulan desa bersama Tim Penulis Usulan.
- f) Melakukan survey dan mengumpulkan data pendukung usulan, termasuk kesediaan swadaya, perkiraan jumlah penerima manfaat, perkiraan besarnya biaya kegiatan sebagai bahan penulisan usulan.
- g) Menginformasikan kepada masyarakat hasil keputusan musyawarah antar desa prioritas usulan dan penetapan usulan yang didanai PNPM Mandiri Perdesaan.
- h) Membantu Fasilitator Kecamatan dalam memfasilitasi proses penyusunan desain dan rencana anggaran biaya kegiatan yang masuk prioritas untuk didanai.

2. Tahap pelaksanaan yang meliputi:

- a) Membantu Tim Pengelola Kegiatan dalam penyelenggaraan Musdes Pertanggung jawaban dan Musyawarah Desa Serah Terima (MDST).
- b) Memfasilitasi masyarakat dalam Musdes Pertanggung jawaban dan MDST.
- c) Memberikan masukan dan bimbingan teknis yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pekerjaan di lapangan.
- d) Membantu TPK dalam pembuatan administrasi yang tertib dan benar.
- e) Memfasilitasi dan mendorong masyarakat dalam memenuhi apa yang menjadi hak dan kewajibannya,

termasuk dalam kesediaan adanya swadaya dan pengembalian pinjaman dalam kaitan kelompok SPP maupun pinjaman perguliran.

- f) Membantu TPK dalam melakukan pengawasan dan pengendalian mutu pelaksanaan kegiatan simpan pinjam perempuan, pendidikan, kesehatan dan pelatihan peningkatan ketrampilan usaha kelompok.
- g) Membantu TPK dalam pengawasan pekerjaan di lapangan, pengendalian kualitas dan produktifitas pekerjaan kegiatan prasarana.
- h) Membantu TPK untuk memfasilitasi proses pengadaan barang dan alat.
- i) Membantu mengawasi pekerjaan di lapangan, terutama pengendalian kualitas dan produktifitas pekerjaan, seperti mencatat pekerjaan-pekerjaan yang tidak sesuai dan melaporkan kepada TPK dan Fasilitator Kecamatan.

### 3. Tahap pelestarian yang meliputi:

- a) Memfasilitasi masyarakat desa dalam pengajuan usulan dari dana pengembalian pinjaman bergulir.
- b) Memfasilitasi masyarakat desa agar tetap berpedoman pada prinsip dan tujuan PNPM Mandiri Perdesaan dalam memanfaatkan dana bergulir.
- c) Membangkitkan motivasi masyarakat dalam pelestarian dan pengembangan hasil kegiatan.
- d) Membantu TPK dalam pembentukan tim pemelihara dan kelompok pemeliharaan.
- e) Memantau hasil dan operasional kegiatan serta kondisi kegiatan prasarana yang telah dibangun terutama bagian mana yang membutuhkan pemeliharaan.
- f) Memfasilitasi proses pemeliharaan terhadap prasarana yang dibangun.  
(<http://upk-pnpmsurade.org/pto-pnpm/penjelasan-pto-pnpm/39-penjelasan-05-pelaku-pnpm-mp/115-kpmd-kader-pemberdayaan-masyarakat-desa.html>).

Sebagai kader pemberdayaan, KPMD didalamnya harus terdiri dari orang yang memiliki kompeten, agar tujuan dari pemberdayaan yaitu memberdayakan masyarakat yang tidak berdaya menjadi berdaya dapat terrealisasi dengan baik. Dengan kompeten yang dimiliki diharapkan KPMD mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan

penuh tanggung jawab, jujur, serta mampu membimbing serta membina hubungan yang baik dengan masyarakat.

## **2. Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan PNPM MP**

### **a. Pengertian Partisipasi Masyarakat**

Manusia sebagai makhluk sosial senantiasa diharapkan saling berhubungan baik terhadap sesamanya, memiliki rasa kebersamaan, toleransi, menghargai dan menghormati sesama, hidup tolong menolong, saling bekerja sama dan gotong royong, serta tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan orang lain. Begitu pula halnya dalam melaksanakan tugas kehidupan dan pembangunan bangsanya, manusia dituntut untuk dapat berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan. Partisipasi masyarakat merupakan unsur yang tak dapat dipisahkan dalam proses pembangunan itu sendiri, baik itu berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan, pemanfaatan, maupun dalam pengevaluasian.

Masyarakat yang partisipatif adalah masyarakat yang mampu berperan secara aktif dalam segala bentuk pembangunan dan pemerintahan yang ada di wilayah atau desa dimana ia berada, mampu mengkondisikan dirinya untuk dapat menemukan jalan terbaik atau alternatif-alternatif yang dapat mendukung pembangunan, mampu mengembangkan potensi diri dan lingkungan alam, tidak egois dan



selalu mengutamakan persatuan dan kesatuan sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat.

Menurut Verhangen dalam Kiki Apriandi (2012:11) “partisipasi merupakan bentuk keikutsertaan atau keterlibatan seseorang (individu atau warga masyarakat) dalam suatu kegiatan tertentu”. Keikutsertaan atau keterlibatan individu atau masyarakat disini artinya bahwa individu atau masyarakat mampu ikut berperan serta secara aktif dalam suatu kegiatan yang ada didalam suatu organisasi ataupun suatu kegiatan tertentu, dengan ikut serta atau terlibat langsung dalam proses perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi dari kegiatan tersebut.

Menurut Wazir (1999:29) “partisipasi bisa diartikan sebagai keterlibatan seseorang secara sadar ke dalam interaksi sosial dalam situasi tertentu”. Dengan demikian, partisipasi dapat diartikan sebagai bagian dari wujud nyata kinerja seseorang untuk kepentingan kelompoknya atau kepentingan bersama yang di lakukan dengan sungguh-sungguh yang muncul atas kemauan atau kesadaran dari dalam dirinya sendiri tanpa adanya paksaan dari orang lain. Kemudian Isbandi Rukminto Adi (2007:27) mendefinisikan partisipasi masyarakat sebagai berikut:

Partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif sosial untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya

mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses pengevaluasi perubahan yang terjadi.

Masyarakat merupakan salah satu bagian penting yang mempunyai pengaruh besar dalam pembangunan, untuk itu setiap individu dari masyarakat harus mempunyai kesadaran akan keberadaannya tersebut, sehingga timbul kesadaran untuk bersama-sama melaksanakan pembangunan bangsa. Kesadaran serta kemauan masyarakat untuk berpartisipasi merupakan modal utama dalam pelaksana pembangunan. Tanpa adanya dorongan, semangat, dukungan serta keikutsertaan masyarakat maka pembangunan tidak akan terlaksana dengan baik.

Masyarakat yang mempunyai andil yang cukup besar dalam pelaksanaan pembangunan diharapkan mampu berpartisipasi secara utuh dan menyeluruh serta bertanggung jawab dalam setiap bentuk kegiatan yang ia laksanakan, dengan tumbuhnya rasa tanggung jawab dalam diri masyarakat maka timbul perasaan bahwa tugas membangun bangsa bukan hanya tugas pemerintah semata melainkan menjadi tugas dari masyarakatnya pula.

Diana Conyers (1991:154-155) mengemukakan pentingnya partisipasi sebagai berikut:

1. Partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan, dan sikap masyarakat setempat, yang tanpa kehadirannya program pembangunan serta proyek-proyek akan gagal.
2. Masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan

dan perencanaannya, karena mereka akan lebih mengetahui seluk beluk proyek tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap proyek tersebut.

3. Bahwa merupakan hak suatu demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat mereka sendiri.

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat merupakan keikutsertaan atau keterlibatan seseorang secara aktif dalam sebuah proses pembangunan ataupun sebuah kegiatan yang dapat diwujudkan melalui tenaga, pemikiran, pemberian harta benda dan lain sebagainya yang dapat menunjang terlaksananya sebuah kegiatan. Dengan demikian partisipasi masyarakat merupakan hal utama yang perlu diperhatikan dan perlu untuk terus ditingkatkan. Mengingat keikutsertaannya sangat mempengaruhi keberhasilan suatu program pembangunan.

#### **a.1. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat**

Sebuah program pembangunan dalam pelaksanaannya tidak semuanya dapat berjalan dengan baik, akan tetapi terdapat beberapa faktor yang dapat menunjang keberhasilan suatu program maupun faktor-faktor yang dapat menjadi penghambat dalam pelaksanaan suatu program, baik itu secara fisik, moral, dan materil. Berikut ini di kemukakan oleh Angell dalam Kiki Apriandi (2012:17) bahwa partisipasi yang tumbuh dalam masyarakat dipengaruhi oleh banyak faktor diantaranya:

### 1. Usia

Faktor usia merupakan faktor yang dapat mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat, apabila dalam suatu daerah tertentu terdapat banyak masyarakat dengan usia produktif yang cukup tinggi maka tingkat partisipasi pun akan cukup tinggi, karena pada usia produktif ini masyarakat masih mempunyai semangat kerja serta antusias yang tinggi.

### 2. Jenis kelamin

Dilihat dari segi kekuatan fisik kaum laki-laki memang terlihat lebih kuat sehingga pengaruhnya dalam pelaksanaan pembangunan tergolong lebih besar jika dibandingkan dengan kaum perempuan, namun pernyataan tersebut hanyalah pandangan orang-orang terdahulu yang hanya memandang dari segi fisiknya saja. Saat ini keberadaan kaum perempuan sudah mulai diperhitungkan sejak adanya kesetaraan gender dan emansipasi wanita yang memberikan kesempatan bagi kaum perempuan untuk memperoleh kedudukan yang setara dengan laki-laki.

### 3. Pendidikan

Pendidikan jelas sangat berpengaruh dalam proses partisipasi, melalui pendidikan seseorang akan menjadi lebih matang dalam pola pikirnya, memiliki pengetahuan yang luas serta lebih bijak dalam pengambilan suatu keputusan. Seseorang

yang memiliki pendidikan juga dianggap dapat mempengaruhi kehidupan sosial dilingkungannya secara positif. Sehingga keberadaannya sangat diperlukan untuk menunjang keberhasilan pembangunan.

#### 4. Pekerjaan dan penghasilan

Setiap masyarakat mempunyai jenis pekerjaan yang berbeda-beda dengan penghasilan yang berbeda-beda pula, yang tentunya dapat mempengaruhi tingkat partisipasi, dimana apabila perolehan penghasilan dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari maka ia sudah termasuk berpartisipasi dalam pembangunan. Untuk berpartisipasi masyarakat dapat menyalurkannya melalui harta, tenaga, pemikiran atau ide, serta waktu.

#### 5. Lamanya tinggal

Orang yang lebih lama menetap disuatu daerah tentunya ia akan lebih banyak mempunyai pengalaman serta lebih memiliki pengetahuan tentang seluk beluk lingkungannya. Semakin lama seseorang tinggal maka rasa memilikinya akan semakin tinggi sehingga hal tersebut tentunya berpengaruh terhadap proses partisipasi.

## **b. Pengertian PNPM MP**

PNPM MP atau Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan merupakan program nasional yang dalam pelaksanaannya berbasis pemberdayaan masyarakat. PNPM Mandiri di laksanakan melalui pengembangan sumber daya manusia yang dapat diberdayakan sehingga mampu mengolah segala potensi yang ada di dalam dirinya ataupun lingkungannya dengan terus memberikan pendampingan, pengarahan, pembinaan, serta pengawasan, yang dapat menjadikan individu masyarakat menjadi lebih kreatif dan mandiri, sehingga upaya dalam penuntasan kemiskinan dapat berkelanjutan.

PNPM Mandiri Perdesaan merupakan program pembangunan yang mengedepankan masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan. Dukungan serta partisipasi masyarakat jelas sangat berpengaruh terhadap keterlaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan ini. Masyarakat yang merupakan pelaku dari program pembangunan, diharapkan mampu menentukan potensi pembangunan yang memiliki pengaruh besar terhadap kelangsungan kesejahteraan yang berkelanjutan. Demi mewujudkan tujuan dari PNPM Mandiri Perdesaan, maka dalam pelaksanaannya perlu beracuan pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

### **1. Bertumpu pada pembangunan manusia**

PNPM Mandiri dalam pelaksanaannya masyarakat hendaknya dapat menentukan program yang berimbas langsung terhadap

pembangunan manusia, dimana dalam pelaksanaan program tersebut masyarakat dapat merasakan secara langsung manfaat dari kegiatan/program yang dilaksanakannya tersebut.

## 2. Otonomi

Prinsip ini mengandung makna bahwa masyarakat sebagai pelaksana dari program PNPM Mandiri berhak dan mempunyai kewenangan untuk mengatur rumahtangganya sendiri secara mandiri dan bertanggung jawab tanpa adanya pengaruh dari luar.

## 3. Desentralisasi

Yaitu memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengelola dan mengatur segala bentuk pembangunan sesuai dengan kapasitas kemampuan masyarakat.

## 4. Berorientasi pada masyarakat miskin

Sesuai dengan tujuan utamanya yaitu pengentasan kemiskinan, maka dalam menentukan segala bentuk pembangunan haruslah berorientasi pada masyarakat miskin. Segala keputusan yang diambil harus mempunyai dampak yang dominan dalam meningkatkan kualitas pendapatan masyarakat miskin.

## 5. Partisipasi

PNPM Mandiri yang merupakan program pemberdayaan masyarakat tentu sangat memerlukan partisipasi masyarakat secara menyeluruh, dimana masyarakat dapat berperan secara aktif dalam

setiap bentuk kegiatan pembangunan mulai dari tahap perencanaan sampai tahap pelestarian.

#### 6. Kesetaraan dan keadilan gender

Setiap bentuk kegiatan, mulai dari proses sampai pada hasil, masyarakat baik laki-laki ataupun perempuan memiliki andil yang sama serta memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam pelaksanaan serta pemanfaatan dari hasil kegiatan pembangunan.

#### 7. Demokratis

Berdasarkan prinsip ini masyarakat diberikan kebebasan untuk mengemukakan saran atau pendapatnya dalam hal pembangunan melalui musyawarah mufakat.

#### 8. Transparansi dan Akuntabel

Transparansi atau keterbukaan dalam setiap pelaksanaan program pembangunan memang sangat diperlukan untuk meminimalisir kecurangan dalam setiap pelaksanaannya, sehingga setiap tindakan yang diambil dalam pelaksanaan pembangunan dapat dipertanggung jawabkan.

#### 9. Prioritas

Prioritas maksudnya yaitu dalam menentukan arah pembangunan, masyarakat harus dapat menentukan pemanfaatnya bagi kepentingan yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat terutama masyarakat miskin, artinya pembangunan tersebut



dilaksanakan karena terdapat kepentingan yang mendesak yang dapat mempengaruhi kelangsungan ekonomi masyarakat terutama masyarakat miskin.

#### 10. Keberlanjutan

Setiap pembangunan yang dilaksanakan harus mempunyai dampak yang berkelanjutan demi kelangsungan perekonomian masyarakat. (<http://bapemas.jatimprov.go.id/index.php/pnpm-mpd>)

Pelaksanaanya PNPM Mandiri sangat menekankan pada partisipasi masyarakat yang tinggi untuk melaksanakan program pembangunan yang nantinya disepakati oleh masyarakat untuk dilaksanakan, mulai dari tahap perencanaan, pengambilan keputusan dalam penggunaan dan pengelolaan dana, pelaksanaan kegiatan, sampai pada upaya pelestarian hasil kegiatan, pengawasan dan evaluasinya. PNPM Mandiri memiliki tujuan yaitu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dengan sasaran utamanya yaitu pengentasan masyarakat miskin yang diberdayakan sehingga mereka dapat lebih maju dan mandiri. Berikut ini adalah tahapan-tahapan pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan:

1. Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Program: melalui forum-forum pertemuan masyarakat khusus program (Musyawarah Desa dan Musyawarah Antar Desa) maupun forum-forum lain yang telah ada di masyarakat. Di setiap desa dilengkapi Papan Informasi sebagai media informasi dan transparansi.
2. Proses Partisipatif Pemetaan Rumahtangga Miskin (RTM) dan Pemetaan Sosial: masyarakat difasilitasi untuk menentukan kriteria masyarakat kurang mampu dan kategori rumah tangga miskin/sangat miskin, membuat peta sosial dusun yang

- mencakup potensi, masalah dan keterbatasan sumberdaya alam, manusia dan potensi lain. Peta Sosial Dusun merupakan cikal bakal Peta Sosial Desa.
3. Perencanaan Partisipatif di Tingkat Dusun dan Desa: melalui musyawarah desa, masyarakat memilih Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) sebagai pendamping dalam proses perencanaan. KPMD memfasilitasi pertemuan kelompok di dusun dan desa, untuk melakukan penggalian gagasan berdasarkan Peta Sosial Dusun/Desa. Warga difasilitasi "Menggagas Masa Depan Desa" (MMDD). Gagasan masyarakat merupakan pengembangan potensi atau solusi dari masalah yang dipetakan dalam Peta Sosial Dusun/Desa. Gagasan tersebut diwujudkan dalam proposal yang ditulis oleh Tim Penulis Usulan (TPU), yang beranggotakan warga desa. Gagasan-gagasan tersebut menjadi bahan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes).
  4. Seleksi Kegiatan di Tingkat Desa dan Kecamatan: warga desa bermusyawarah untuk memutuskan usulan desa. Musyawarah terbuka bagi segenap anggota masyarakat untuk menghadiri dan memutuskan usulan desa yang diajukan untuk didanai program. Keputusan akhir mengenai kegiatan yang akan didanai, diambil dalam forum Musyawarah Antar Desa (MAD) yang dihadiri oleh wakil-wakil dari setiap desa. Prioritas usulan dilakukan dengan memperhatikan rekomendasi dari Tim Verifikasi (TV), yang beranggotakan masyarakat desa yang dipilih karena memiliki keahlian tertentu. Usulan masyarakat yang belum terdanai akan menjadi bahan dalam Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) maupun pihak lain yang berkomitmen untuk mendanainya.
  5. Masyarakat Melaksanakan Kegiatan: dalam forum musyawarah, masyarakat memilih anggotanya menjadi Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) sebagai pengelola kegiatan di desa mereka. Fasilitator dan Konsultan akan mendampingi masyarakat dan pelaku program di setiap jenjang dalam mendesain kegiatan/ prasarana, anggaran, supervisi pelaksanaan, sertifikasi mutu, memberi sejumlah pelatihan/peningkatan kapasitas, serta koordinasi lintas sektoral. Para pekerja/penerima manfaat berasal dari desa yang bersangkutan.
  6. Akuntabilitas dan Laporan Perkembangan: selama pelaksanaan kegiatan, TPK harus melaporkan perkembangan kegiatan dalam pertemuan terbuka di desa (setiap akan mencairkan dana tahap berikutnya dan saat kegiatan usai). Masyarakat diajak untuk memantau dan mengawasi jalannya kegiatan.
  7. Pemeliharaan dan Keberlanjutan: hasil kegiatan dikelola dan dikembangkan secara mandiri oleh masyarakat/ pemanfaat melalui kelompok pengelola yang dipilih. Sebelum

melaksanakan tugasnya kelompok masyarakat ini dibekali dengan sejumlah pelatihan.  
(<http://bapemas.jatimprov.go.id/index.php/pnpm-mpd>)

Tahapan pelaksanaan PNPM Mandiri di atas menunjukkan bahwa semua bentuk kegiatan dilaksanakan oleh masyarakat sendiri, sehingga sangat diharapkan program pembangunan ini dapat dilaksanakan dengan maksimal, karena pada dasarnya apa yang masyarakat bangun nantinya adalah berdasarkan keinginan dari masyarakat sendiri, sehingga dalam pelaksanaannya masyarakat tidak akan menyepelkannya karena memang apa yang mereka bangun adalah dari mereka dan oleh mereka yang nantinya mereka sendirilah yang akan menikmati manfaatnya.

## **B. Kerangka Pikir**

Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) yang mempunyai tugas memfasilitasi atau memandu masyarakat dalam mengikuti atau melaksanakan tahapan PNPM Mandiri Perdesaan di desa dan kelompok masyarakat pada tahap perencanaan, pelaksanaan maupun pemeliharaan yang berhubungan secara langsung dengan masyarakat, sudah semestinya terdiri dari orang yang berkompeten, dengan kompeten yang dimiliki diharapkan KPMD mampu mengelola setiap permasalahan yang begitu kompleks yang terjadi pada masyarakat, sehingga kecemburuan sosial dalam pengambilan keputusan dapat diminimalisir. Dengan demikian partisipasi masyarakat akan menjadi lebih meningkat dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan,

karena mereka akan merasa di hargai pendapatnya, dan merasa bahwa keputusan yang diambil bersama tersebut adalah keputusan yang memang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat secara menyeluruh.

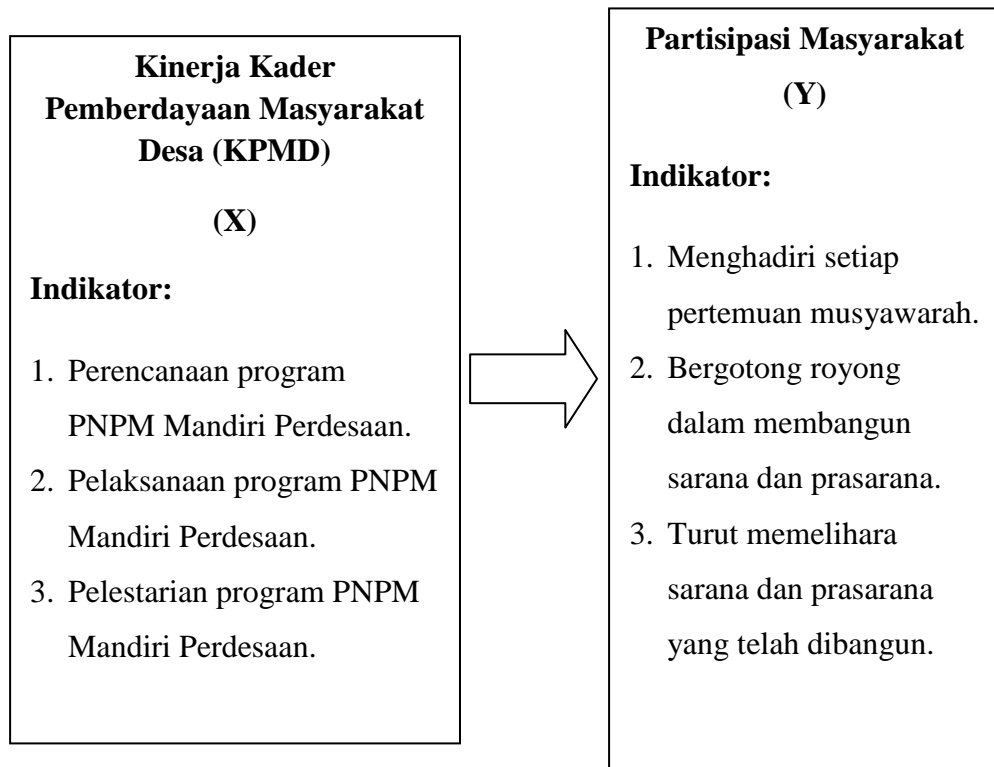
Masyarakat yang begitu kompleks menjadi tantangan tersendiri bagi KPMD untuk dapat menyatukannya, untuk itu diperlukan kinerja ekstra untuk dapat menyatukan dari setiap pemikiran individu yang ada dalam masyarakat. PNPM Mandiri Perdesaan yang pelaksanaannya diserahkan langsung kepada masyarakat tidak menutup kemungkinan dapat menimbulkan konflik antar individu dalam masyarakat.

Masyarakat yang merupakan pelaksana dari program pembangunan sangat diperlukan kinerjanya serta partisipasinya dalam setiap pembangunan demi tercapainya tujuan dari pembangunan tersebut, untuk itu KPMD yang mempunyai tugas sebagai pendamping masyarakat harus mampu menjadi penggerak, pendorong, dan pemotivasi serta mampu memberikan arahan kepada masyarakat agar masyarakat dapat berpartisipasi secara aktif dan menyeluruh dari setiap program pembangunan yang akan dilaksanakan

KPMD yang berperan sebagai pendamping masyarakat dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan harus mampu menggerakkan masyarakat, membimbing masyarakat, mengarahkan masyarakat, mengawasi masyarakat dalam tahap perencanaan yang meliputi penggalian gagasan masyarakat, menyusun usulan desa, melakukan survey dan mengumpulkan data pendukung usulan dan seterusnya. Dalam tahap pelaksanaan yang meliputi memfasilitasi dan mendorong masyarakat dalam memenuhi apa yang menjadi

hak dan kewajibannya, membantu mengawasi pekerjaan di lapangan, terutama pengendalian kualitas dan produktifitas pekerjaan. Dalam tahap pelestarian yang meliputi membangkitkan motivasi masyarakat dalam pelestarian dan pengembangan hasil kerja, pemeliharaan terhadap sarana yang di bangun maupun setiap bentuk kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan, agar masyarakat dapat berpartisipasi secara utuh dan menyeluruh melalui tenaga, pemikiran maupun waktu yang mereka miliki dengan selalu menghadiri setiap pertemuan musyawarah, ikut bergotong royong dalam membangun sarana dan prasarana, serta turut memelihara sarana dan prasarana yang telah dibangun.

Berdasarkan pemikiran di atas, hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



**Gambar Paradigma 2.1. Paradigma Penelitian**

### C. Hipotesis

Berdasar teori dan kerangka pikir di atas, maka dalam penelitian ini hipotesis penelitian ditetapkan sebagai berikut:

H<sub>0</sub>: Tidak ada pengaruh kinerja Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) terhadap tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan di Desa Sumanda Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus Tahun 2015.

H<sub>1</sub>: Ada pengaruh kinerja Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) terhadap tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan di Desa Sumanda Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus Tahun 2015.